

BAB IV

KARAKTERISTIK PEMERINTAH OTORITER MESIR DI BAWAH PRESIDEN ABDEL FATTAH AL SISI

Pasca kudeta militer pada tahun 2013 yang menggulingkan Presiden Muhammad Mursi, Mesir kemudian dipimpin oleh pemerintahan sementara di bawah dominasi militer Al Sisi. Penangkapan Presiden Mursi oleh militer Mesir telah memicu kemarahan pendukungnya. Selama berbulan-bulan, Ikhwanul Muslimin terus-menerus melakukan demonstrasi menentang tindakan kudeta yang dilakukan Al Sisi. Stabilitas keamanan di Mesir semakin memburuk, terlebih ketika dominasi militer Al Sisi melakukan tindakan represif terhadap oposisi Ikhwanul Muslimin. Aksi bentrokan yang terjadi antara pendukung Mursi dengan aparat keamanan mengakibatkan lebih dari 900 korban jiwa. Ratusan demonstran ditangkap dan dipenjarakan. Pemerintahan sementara Mesir kemudian memberlakukan Undang-undang Demonstrasi yang semakin membatasi gerak lawan politiknya. Sampai akhirnya, puncak kemarahan Ikhwanul Muslimin terjadi ketika Peradilan Mesir menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap 683 anggota Ikhwanul Muslimin pada April 2014 (IRIB World Service, 2014).

Sikap represif yang dilakukan Al Sisi ini semakin menguatkan dugaan rakyat Mesir bahwa tindakan tangan besi Al Sisi menandakan kembalinya rezim militer seperti pada masa pemerintahan otoriter Hosni Mubarak. Kubu oposisi menganggap

kemenangan mutlak Al Sisi dalam pemilu presiden tahun 2014 dengan perolehan suara 98%, hanyalah sebuah rekayasa untuk melegitimasi kekuasaan dominasi militer Al Sisi yang telah berlangsung sejak kudeta militer tahun 2013. Terlebih, pemilu presiden tahun 2014 dilaksanakan tanpa melalui pemilu parlemen sebelumnya. Dalam membangun rezim otoriter baru ini, pemerintahan Al Sisi mirip dengan beberapa karakteristik model rezim Otoriter Birokratik (OB). Dalam bab ini, akan membahas beberapa karakteristik model rezim Otoriter Birokratik (OB) yang mirip dengan pemerintahan Mesir di bawah Presiden Abdel Fatah Al Sisi, yaitu: Pertama, pemerintahan dipegang oleh militer berkolaborasi dengan teknokrat sipil. Kedua, pemerintahan melakukan demobilisasi massa. Ketiga, pemerintah melakukan tindakan represif dalam mengendalikan oposisi.

A. Pemerintahanan Dipegang Oleh Militer Berkolaborasi dengan Teknokrat Sipil

Tidak ada yang menyangka sebelumnya bahwa Menteri Pertahanan Mesir, Abdel Fattah Al Sisi yang telah ditunjuk oleh Presiden Muhammad Mursi untuk menggantikan posisi Mohamed Hussein Tantawi sebagai Kepala SCAF Mesir pada akhirnya melakukan kudeta terhadap pemerintahan Mursi pada 3 Juli 2013. Keputusan Al Sisi menahan Presiden Mursi dan menggantikan kekuasaannya adalah dengan dalih menyelamatkan keamanan negara. Sejak saat itu, rezim militer Al Sisi telah memulai kekuasaannya di balik pemerintahan sementara Mesir.

Dalam pernyataan kudeta terhadap Presiden Mursi yang disiarkan melalui TV Mesir, Al Sisi juga menyebutkan *road map* (peta jalan) yang akan ditempuh selama transisi pemerintahan, yaitu: Pertama, penangguhan Konstitusi Baru yang telah direferendum pada Desember 2012. Kedua Percepatan pemilihan presiden sementara sampai pemilu. Ketiga, pembentukan pemerintahan koalisi nasional. Keempat, pembentukan Komisi untuk mengamandemen Konstitusi. Apabila mengacu pada Konstitusi yang berlaku pada saat itu, bukan kapasitas kalangan militer untuk menggantikan Presiden Muhammad Mursi yang juga sebagai Panglima Tertinggi Militer. Dalam pasal 153 Konstitusi Mesir menyebutkan, apabila dalam kondisi tertentu, presiden tidak dapat menjalankan tugasnya, maka yang mengemban tugas kepresidenan sementara adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (*Majlis Sa'ab*). Bila *Majlis Sa'ab* tidak ada, maka tugas kepresidenan sementara di jalankan oleh *Majelis Shuro* sampai dilaksanakannya pemilu selanjutnya. Oleh karena itu, jalan yang ditempuh Al Sisi ini, menjadikan pemerintahan Mesir kembali dipegang oleh militer (Basyar, 2015, pp. 1-2)

Dalam membangun rezim otoriter baru di Mesir, Al Sisi tidak ingin mengulangi kesalahan sebagaimana yang dilakukan Menteri Pertahanan, Mohamed Hussein Tantawi pada saat Presiden Mubarak tumbang dengan tidak mengangkat dirinya sebagai presiden pemerintahan sementara setelah penggulingan Presiden Mursi. Al Sisi lebih memilih menunjuk Ketua Mahkamah Konstitusi, Adly Mansour sebagai presiden sementara Mesir. Dalam menjalankan transisi politik pasca kudeta,

rezim militer Al Sisi didampingi oleh pemerintahan teknokrat hingga pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu parlemen (Suara Merdeka Online, 2013).

Pemerintahan sementara Mesir ini dipimpin oleh Perdana Menteri Hazem El Beblawi, seorang ekonom dan juga Mantan Menteri Keuangan Mesir. Sementara itu, Al Sisi tetap menempati posisi Menteri Pertahanan merangkap sebagai Wakil Perdana Menteri. Di posisi Menteri Dalam Negeri tetap ditempati oleh Mohammed Ibrahim. Ibrahim adalah satu-satunya menteri warisan pemerintahan Mursi. Ia mendapat tugas tambahan mengawasi kepolisian. Sedangkan posisi Menteri Dalam Negeri ditempati Nabil Fahmy yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Duta Besar Mesir untuk Amerika Serikat pada tahun 1999-2008. (Choirul, 2013).

Kabinet pemerintahan sementara beranggotakan 35 orang. Dalam susunan kabinet yang didominasi kaum teknokrat dari kalangan liberal ini tidak tampak tokoh-tokoh dari partai Islam. Meskipun presiden sementara telah menyediakan kursi untuk Ikhwanul Muslimin, namun pendukung Muhammad Mursi ini menolak tawaran Presiden Adly Mansour. Bagi pendukung Mursi, pemerintahan sementara tidak sah karena militer telah melakukan kudeta terhadap pemerintahan sah dan mencederai demokrasi di Mesir. Sementara itu, pemerintahan sementara Mesir yang berpandangan liberal juga memasukkan tiga nama perempuan dalam kabinetnya. Mereka menempati posisi Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Informasi. Kabinet (Choirul, 2013).

Setelah resmi menjadi Presiden Mesir, Al Sisi kemudian melantik Kabinet Baru pada 17 Juni 2014. Kabinet pertama Presiden Al Sisi terdiri dari sekitar 30

menteri dan dipimpin oleh Perdana Menteri Ibrahim Mahlab. Dalam Kabinet Baru Mesir, Presiden Al Sisi menempatkan empat perempuan dan beberapa teknokrat (Haryono, 2014). Pada saat perombakan Kabinet kedua, Presiden Al Sisi kembali menempatkan seorang teknokrat. Kabinet kedua pemerintahan Mesir mencakup 16 menteri baru dan 33 kursi pembantu pemerintah. Seperti dilansir dari pemberitaan Reuters, salah seorang menteri yang menurut sang presiden merupakan pembantu terbaiknya diangkat menjadi perdana menteri menggantikan Ibrahim Mahlab. Ia adalah Sharif Ismail, yang menjabat sebagai menteri perminyakan dalam kabinet sebelumnya. Menurut pemerintah, Ismail dipandang sebagai teknokrat veteran yang berpengalaman. Sharif sempat bekerja di perusahaan minyak milik negara sebelum ia bergabung di kabinet pada 2013 (Pratama, 2015)

B. Pemerintah Melakukan Demobilisasi Massa

Pasca kudeta militer terhadap Presiden Mursi, kembalinya militer ke kancah politik Mesir menjadikan peranan sipil semakin lemah. Al Sisi telah memonopoli kekuasaan di balik pemerintahan sementara Mesir. Sejak Mahkamah Konstitusi membekukan parlemen yang didominasi oleh FJP, pemerintahan sementara Mesir kemudian berjalan tanpa adanya parlemen. Hal ini semakin mempersempit ruang gerak oposisi Ikhwanul Muslimin dalam kehidupan politik. Terlebih, pemerintahan sementara Mesir di bawah kendali Al Sisi terus melakukan upaya-upaya demobilisasi massa dalam menghadapi pemberontakan kubu oposisi, Ikhwanul Muslimin. Menjelang pemilu presiden tahun 2014, pemerintahan sementara Mesir kembali

menangguhkan pemilu parlemen yang rencananya akan dilangsungkan pada Maret 2014. Proses pemilu parlemen terpaksa harus ditunda lantaran Pengadilan Mesir menyatakan bahwa sebagian aturan pemilu tidak konstitusional (Samosir, 2015). Dengan dalih apapun, pelaksanaan pemilu presiden pada Mei 2014 dengan tanpa pelaksanaan pemilu parlemen adalah melanggar konstitusi. Hal ini semakin membuktikan adanya upaya pemerintahan sementara Mesir untuk membatasi gerak oposisi Ikhwanul Muslimin dalam pertarungan pemilu presiden 2014. Sebagai lawan politik terkuat yang memiliki pendukung terbesar di Mesir, Ikhwanul Muslimin tidak tinggal diam dan akan terus menentang pemerintahan dominasi militer Al Sisi.

Tantangan berat lain bagi pemerintahan sementara Mesir adalah menghadapi gerakan protes yang menentang kudeta terhadap Muhammad Mursi. Pendukung Mursi, Ikhwanul Muslimin terus menerus melakukan aksi demonstrasi menuntut pengembalian legitimasi kekuasaan Mursi. Aksi demonstrasi yang diwarnai kekerasan mendorong pemerintah untuk menekan kelompok Ikhwanul Muslimin karena dianggap sebagai ancaman stabilitas keamanan Negara. Pemerintahan sementara Mesir di bawah dominasi militer Al Sisi kemudian menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris pada 25 Desember 2013. Terkait hal ini, semua aktivitas, pendanaan dan keanggotaan dalam kelompok IM adalah sebuah kejahatan. Pengumuman ini merupakan puncak ketegangan antara pemerintah dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang menggelar demonstrasi hampir setiap hari sejak kudeta militer 3 Juli 2013 (Auliani, 2013)

Melihat pergerakan Ikhwanul Muslimin yang sempat mendominasi kursi parlemen melalui partai FJP, Al Sisi yang telah resmi menjabat sebagai presiden Mesir pada Mei 2014 kemudian membubarkan FJP pada Agustus 2014. Melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mesir, FJP dibubarkan dan seluruh asetnya disita negara. Keputusan pengadilan ini adalah keputusan final sehingga FJP tidak dapat mengajukan banding (Hardoko, Mesir Bekukan Sayap Politik Ikhwanul Muslimin, 2014). Peradilan terhadap kasus ini terjadi setelah Komite Hubungan Partai Politik pemerintah Mesir mengajukan keberatan dan menuduh FJP tidak memiliki landasan hukum. FJP yang didirikan pada tahun 2011 telah meraih mayoritas kursi parlemen dalam pemilu parlemen pertama Mesir yang diselenggarakan secara demokratis setelah enam dekade. Tetapi, pada Juni 2012, Mahkamah Konstitusi membubarkan pemilu parlemen karena tidak konstitusional (BBC Indonesia, 2014).

Meskipun pemerintah Mesir telah melakukan upaya untuk mempersempit ruang gerak politik oposisi Ikhwanul Muslimin, namun jumlah pendukungnya yang begitu banyak membuat kelompok Islam ini tidak dapat disingkirkan begitu saja. Ikhwanul Muslimin terus mendesak pemerintah agar mewujudkan demokrasi seperti yang dijanjikan Al Sisi pada saat pencalonan dirinya pada pemilu presiden 2014. Terkait hal ini, pemerintah mengklaim pemilu parlemen yang dilaksanakan pada akhir 2015 adalah komitmen pemerintah terhadap demokrasi. Menurut pengamat politik, anggota *Brookings Center for Middle East Policy* di Washington, BHa.A. Hellyer, ia meragukan keefektifan parlemen ini dalam mengawasi eksekutif. Meskipun reformasi politik telah berjalan namun kemungkinan tidak akan ada

perubahan yang signifikan dari hasil parlemen ini. Meskipun Dewan Perwakilan ini akan menyediakan 568 kursi, namun Sebanyak 448 kursi akan diisi oleh peraih suara terbanyak di pemilu, sementara 120 lainnya diduduki orang yang telah dipilih secara khusus untuk mewakili kaum perempuan, Kristen, dan anak muda. Di sisi lain, Presiden dapat menunjuk beberapa orang untuk masuk ke parlemen (Samosir, 2015).

Terkait hal ini, strategi Al Sisi yang gagal menyingkirkan Ikhwanul Muslimin setelah menghapus para pemimin lama, mendorong pemerintah Mesir melakukan pendekatan seperti yang dilakukan Hosni Mubarak. Pemerintah Mesir memutuskan untuk mendukung kepemimpinan baru Ikhwanul Muslimin sehingga mereka tidak berubah menjadi rival serius bagi kubu sekuler dan militer Mesir dengan menerima partisipasi minimal Ikhwanul Muslimin di kancah politik Mesir tanpa memegang peran penentu sama sekali. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah otoriter Al Sisi ini semakin membuktikan tindakan demobilisasi massa.

C. Pemerintah Melakukan Tindakan Represif dalam Mengendalikan Oposisi

Sejak kudeta militer yang berhasil menggulingkan Presiden Mursi, kekuasaan dominasi militer Al Sisi berhasil menguasai pemerintahan Mesir. Di balik pemerintahan sementara yang dibentuk untuk menjalankan masa transisi pasca kudeta, Al Sisi banyak melakukan tindakan represif dalam mengendalikan oposisi. Mengingat, pendukung Mursi, Ikhwanul Muslimin terus-menerus melakukan gerakan protes menentang tindakan kudeta. Gerakan pembangkangan sipil yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin dan pendukungnya dianggap sebagai ancaman stabilitas

keamanan negara. Al Sisi mengaitkan hal ini sebagai kendala pemerintah dalam memperbaiki permasalahan ekonomi dan keamanan yang semakin memburuk sejak revolusi Mesir tahun 2011. Sehingga upaya pemerintahan Al Sisi dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan keamanan negara adalah dengan pendekatan represif yaitu menumpas oposisi Ikhwanul Muslimin yang kerap melakukan tindakan konfrontasi terhadap aparat keamanan.

Pasca kudeta militer, pendukung pro-pemerintahan Mursi, Ikhwanul Muslimin terus-menerus melakukan aksi demonstrasi menentang pemerintahan sementara Mesir. Menghadapi aksi demonstrasi yang semakin meluas, pemerintah melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap tokoh dan aktivis Ikhwanul Muslimin dengan tuduhan telah melakukan provokasi kepada rakyat Mesir untuk melawan pemerintahan sementara yang dibentuk oleh SCAF Mesir (Gafur, 2014, p. 95). Bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan kerap terjadi hingga mengakibatkan korban tewas dan luka-luka.

Tindakan represif pemerintah terus dilakukan hingga pada 14 Agustus 2014, aksi demonstrasi memuncak setelah dipicu oleh tindakan aparat keamanan yang membubarkan demonstran secara paksa menggunakan kendaraan lapis baja, bulldoser dan helikopter. Dalam aksi demonstrasi yang telah menewaskan 900 orang termasuk 100 tentara dan polisi, tiga jurnalis mancanegara juga turut menjadi korban tewas saat melaksanakan tugas reportase. Pasca terjadinya bentrokan dalam beberapa hari

terakhir, demonstrasi para pendukung Mursi yang sebelumnya diikuti oleh puluhan ribu orang menunjukkan tanda-tanda menurun. Beberapa pihak menilai kekuatan organisasi tersebut telah menurun akibat penangkapan sejumlah pemimpinnya oleh pihak militer. (Marboen, 2013).

Selama perjalanan pemerintahan dominasi militer Al Sisi, Polisi Rahasia Mesir juga melakukan tindakan represif terhadap media dengan menangkap 20 wartawan yang dituduh bekerjasama dan memihak Ikhwanul Muslimin. Sebanyak 16 wartawan Mesir dan 4 wartawan asing ditangkap dan dipenjarakan dengan beberapa tuduhan, antara lain: Pertama, melakukan pertemuan ilegal dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris pada Desember 2014. Kedua, membantu organisasi teroris dalam memberi informasi, memasok peralatan dan uang, serta mempromosikan kelompok IM dengan menyiarkan kegiatan organisasinya. Ketiga, menyiarkan berita palsu (pembongkaran publik) yang membahayakan kepentingan nasional dan keamanan publik. Keempat, menyebarkan desas desus untuk meyakinkan masyarakat internasional bahwa Mesir mengalami perang saudara. Kelima, menggunakan hotel bintang lima Marriot, tempat mereka tinggal sebagai pusat penyiaran berita Al Jazeera (Muhaimin, 2013)

Tindakan represif dominasi militer Al Sisi ini semakin menuai protes dari Ikhwanul Muslimin. Ketegangan antara pemerintah dengan Ikhwanul Muslimin semakin memuncak menyusul pengadilan Mesir menjatuhkan vonis hukuman mati

terhadap 683 anggota Ikhwanul Muslimin termasuk Muhammad Mursi. Vonis hukuman mati ini telah menyulut protes di kalangan internal Mesir dan bahkan kecaman dari masyarakat internasional. PBB menyatakan kekhawatiran atas keputusan pengadilan Mesir tersebut dan menuntut pemerintah sementara Mesir untuk tetap berkomitmen dengan peraturan Hak Asasi Manusia internasional (IRIB World Service, 2014).

Di dalam sistem Peradilan Mesir yang juga mengikuti kebijakan keamanan dominasi militer Al Sisi, putusan hukuman vonis mati terhadap lebih dari 600 anggota Ikhwanul Muslimin dinilai tidak adil. Tindakan represif ini telah melanggar Hak Asasi Manusia. Namun, para pendukung pemerintahan Al Sisi meyakini bahwa kebijakan ini telah mengembalikan stabilitas relatif Mesir dan situasi keamanan. Mereka juga meyakini bahwa hak asasi manusia menjadi sia-sia ketika di masyarakat terdapat sebuah kelompok yang mengancam keamanan nasional (IRIB World Service, 2016).

Dalam laporannya, Lembaga HAM Internasional, Amnesty International mengecam keras kepolisian dan aparat atas penghilangan warga sipil dengan sengaja di Mesir sejak awal 2015. Korban sering mengalami penganiayaan, termasuk syok sengatan listrik pada bagian tubuh yang sensitif, juga pemerkosaan. Departemen Dalam Negeri Mesir menyangkal melakukan kesalahan, namun membenarkan

laporan bahwa banyak orang berada dalam, tahanan, tanpa merinci apakah prosesnya sesuai hukum (DW.com, 2016)

Hingga satu tahun pemerintahan Mesir di bawah Presiden Al Sisi, tindakan represif militer terhadap oposisi terus berlangsung. Amnesty International mencatat, tindakan keras militer telah menyebabkan sedikitnya 41.000 orang ditangkap, ditahan dan didakwa melakukan tindak pidana dengan hukuman yang tidak adil. Otoritas Mesir menunjukkan, mereka tidak akan berhenti dalam upaya menghancurkan semua hambatan terhadap otoritas (Pascal, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menemukan fakta-fakta bahwa pemerintahan Mesir di bawah dominasi militer Al Sisi, sejak peristiwa kudeta militer tahun 2013 hingga satu tahun pemerintahan Mesir dipimpin oleh Presiden Al Sisi mirip dengan beberapa karakteristik model rezim Otoriter Birokratik (OB), yaitu: Pertama, pemerintahan dipegang oleh militer berkolaborasi dengan teknokrat sipil. Kedua, pemerintahan melakukan demobilisasi massa. Ketiga, pemerintah melakukan tindakan represif dalam mengendalikan oposisi.